

PEREMPUAN DAN MODERNISASI

WOMEN AND MODERNIZATION

Thung Ju Lan

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI)
julan@indo.net.id

Abstract

In this article, the writer discusses different kind of changes experienced by women in rural and urban areas due to the process of modernization. But in general they both experience a shift in values about family and working outside their home. Nevertheless, modernization does not bring gender equality as it promises. The fact even shows a clear social and cultural gap between women themselves, particularly between those living in rural and urban areas. The shift in values as well as changes in gender relations do not solve women's problems and dilemma, especially those of poor village women. Therefore, it is important to rethinking the State policies which at the present have been focused on the intensification of the women's role in development. It is imperative to pay attention to the role of women in the family as the main pillar for nation and society progress.

Keywords: *women, modernization, gender equality, rural and urban women*

Abstrak

Tulisan ini mencoba memahami perubahan yang terjadi pada diri perempuan dalam kaitannya dengan modernisasi. Pada hakikatnya, baik perempuan di perdesaan maupun perempuan di perkotaan terkena dampak modernisasi yang mengubah nilai-nilai yang dimilikinya. Akan tetapi, modernisasi tidak membawa kesetaraan gender yang dijanjikannya, bahkan ketimpangan sosial budaya tampak di antara perempuan di perdesaan dan perempuan di perkotaan. Pergeseran nilai dan perubahan hubungan antargender tidak membantu menyelesaikan permasalahan perempuan, apalagi perempuan perdesaan yang miskin. Oleh karena itu, perlu adanya kajian ulang kebijakan negara, yang saat ini terlalu fokus pada peningkatan peran perempuan dalam pembangunan, agar lebih memperhatikan peran perempuan dalam keluarga sebagai pilar kemajuan masyarakat dan bangsa.

Kata kunci: perempuan, modernisasi, kesetaraan gender, perempuan perdesaan dan perempuan perkotaan

Pendahuluan

Secara tradisional, status perempuan di Indonesia selalu berada dalam konteks keluarga, yaitu sebagai ibu rumah tangga. Secara hukum (adat) dan agama, kedudukan perempuan ditetapkan berada di bawah laki-laki. Kondisi ini tidaklah unik untuk Indonesia, karena di banyak negara, khususnya negara-negara Asia, keadaannya juga sama. Akan tetapi, sudah sejak Perang Dunia ke-II, kita menemukan perubahan pada status perempuan terutama karena sistem pendidikan barat yang diajarkan melalui sekolah. Muncul ide emansipasi, yaitu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki secara politik dan hukum. Meski perdebatan terus berlanjut tentang sejauh mana perempuan dan laki-laki dapat setara dalam berbagai aspek kehidupan, kenyataan membuktikan bahwa dalam banyak kasus, perempuan terus memperjuangkannya dan mulai mendapatkan hak

yang sama dengan laki-laki dalam banyak aspek dan kegiatan. Tulisan ini ingin membahas perubahan yang terjadi dalam kaitannya dengan modernisasi yang, menurut penulis, mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan di kalangan perempuan Indonesia.

Secara umum, modernisasi dipahami sebagai proses perubahan atau transformasi dari kehidupan bersama yang bersifat tradisional ke arah pola-pola sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di negara-negara Barat. Perwujudannya tampak melalui perubahan pola-pola perilaku yang mengadopsi aspek-aspek kehidupan modern, seperti mekanisasi, urbanisasi, penggunaan alat-alat komunikasi massa, serta sistem administrasi-birokrasi yang teratur, terencana, dan terukur. Modernisasi seringkali dipertukarkan dengan westernisasi, padahal kedua hal itu sangat berbeda. Westernisasi adalah sikap meniru dan

menerapkan budaya Barat tanpa adanya upaya untuk menyeleksi atau menyesuaikannya dengan nilai-nilai yang dimiliki. Pengaruh budaya Barat itu terutama diperoleh melalui media cetak dan elektronik, seperti buku, majalah, televisi, video, dan internet. Proses modernisasi di Indonesia terjadi dalam skala yang besar ketika sistem pemerintahan sentralistis yang dikenal di negara-negara Barat mulai diperkenalkan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Akan tetapi, keputusan untuk meneruskan sistem pemerintahan tersebut dengan memasukkannya ke dalam konstitusi Indonesia atau Undang-undang Dasar 1945, merupakan tonggak dasar dari penerapan modernisasi dalam kehidupan bersama di Indonesia yang sebelumnya hanya dikenal dari pulau-pulau, kerajaan-kerajaan, serta pelabuhan perdagangannya. Proses ini tidak hanya membawa perubahan pada komunitas-komunitas yang hidup di kepulauan Nusantara, melainkan juga pada kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat yang saat ini dikenal sebagai masyarakat Indonesia. Salah satu dari kelompok-kelompok sosial itu adalah kelompok perempuan.

Prolog: Sumpah Pemuda dan NKRI

Sebagian dari kita selalu mengkritik bahwa kesetaraan gender merupakan ide yang dibawa dari kebudayaan Barat yang merusak nilai-nilai budaya Indonesia, karena membawa seks bebas dan fenomena liberal sejenisnya. Akan tetapi, jarang dari kita yang membahas modernisasi sebagai bagian dari budaya Barat yang kita adopsi secara sadar melalui bentuk negara republik dan sistem pendidikan sekolah. Dalam pandangan penulis, kedua hal yang disebut terakhir ini merupakan penyebab utama dari perdebatan tentang kesetaraan gender hari ini.

Ketika Sumpah Pemuda diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928, jelas sekali bahwa posisi perempuan sebagai bagian dari bangsa Indonesia setara dengan laki-laki, karena bunyi sumpah itu, sebagaimana tercantum pada dinding Museum Sumpah Pemuda di Jl. Kramat Raya 106, Jakarta Pusat (sumpahpemuda.org), adalah sebagai berikut:

Pertama:

Kami poetra dan poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah air Indonesia.

Kedoea:

Kami poetra dan poetri Indonesia mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.

Ketiga:

Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.

Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mengikuti jejak perkumpulan-perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, dan Sekar Rukun yang meleburkan diri dalam Indonesia Muda, organisasi-organisasi perempuan dari berbagai daerah di Indonesia juga meleburkan diri menjadi Keputrian Indonesia Muda yang didirikan pada akhir Desember 1931 sebagai bagian dari Indonesia Muda. Keputusan meleburkan diri itu diambil pada kongres perempuan nasional pertama tanggal 22 Desember 1928 dan dihadiri oleh 31 organisasi perempuan (Marlita & Poerwandari, 2000:86).

Kemudian, dengan mendirikan Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (mahkamahkonstitusi.go.id), pada hakikatnya para pendiri negara kita secara sadar memilih mengadopsi budaya dan nilai-nilai Barat, karena seperti kita ketahui istilah '*Republic*' diperkenalkan oleh Plato (<http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/plato/republic.pdf>) melalui percakapan Socrates dengan berbagai karakter tentang keadilan dan model politik sebuah kota (http://www.protevi.com/john/FH/Republic_complete.pdf). Jika kita membahas setiap detail dari UUD 1945 itu akan tampak jelas ide-ide ataupun nilai-nilai yang berasal atau diambil dari kebudayaan Barat, antara lain konsep warga negara (Bab X) dan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (Bab X, Pasal 27 ayat 1). Konsep warga negara dan pengertian yang diperkenalkannya tersebut menempatkan tua-muda, laki-laki-perempuan, anak-anak ataupun dewasa, kaya-miskin, besar-kecil, gemuk-kurus, hitam-putih ataupun berwarna, serta yang sehat maupun yang cacat dalam satu kategori yang sama tanpa perbedaan. Hal yang membedakan hanyalah warga negara dan bukan warga negara.

Modernisasi dan Kesetaraan Gender

Apa itu modernisasi? Secara umum, dikatakan bahwa modernisasi adalah “suatu perubahan masyarakat dalam seluruh aspeknya dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern” (Seputarpengetahuan.com, 2014). Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat “modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang” (Seputarpengetahuan.com, 2014) Pendapat yang lebih lengkap dikemukakan oleh Wi[il]bert E. Moore (dalam Bernstein, 1971), yaitu “modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi dan organisasi sosial dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh negara-negara Barat yang telah stabil”. Aplikasi dari modernisasi adalah modernitas yang dibedakan atas modernitas individu dan modernitas sosial. Menurut Terry Barret (1997), gerakan dan peristiwa modernitas yang utama adalah demokrasi, kapitalisme, industrialisasi, ilmu pengetahuan, dan urbanisasi. Dalam hal ini, dengan mengacu pada Paul Harrison (2001), barangkali dapat ditambahkan modernitas dalam bentuk negara-bangsa. Sementara itu, bendera dari modernitas, menurut Barret (1997), adalah kebebasan dan individu.

Berbicara tentang karakteristik modernisasi di berbagai negara, Shmuel N. Eisenstadt (1996) melihat di negara-negara Eropa Barat, modernisasi berkembang dari negara feodal dengan pusat-pusat urban yang kuat, sedangkan di negara-negara Eropa Timur, ia berkembang dari negara yang lebih autokratik dengan masyarakat yang belum terurbanisasi. Di Amerika, Kanada, dan Australia, modernisasi berkembang melalui proses kolonisasi dan imigrasi, yang sebagian di antaranya berakar dari motivasi keagamaan yang kuat dan melalui kelompok-kelompok keagamaan yang menetap, dan sebagian lagi dilatarbelakangi oleh motivasi ekonomi atau peningkatan status sosial. Di sebagian besar masyarakat Asia dan Afrika, kecuali Jepang¹ dan Cina², modernisasi dimulai

¹ Di Jepang proses modernisasi berkembang dari negara feodal yang tersentralisasi dengan karakteristik yang agak unik.

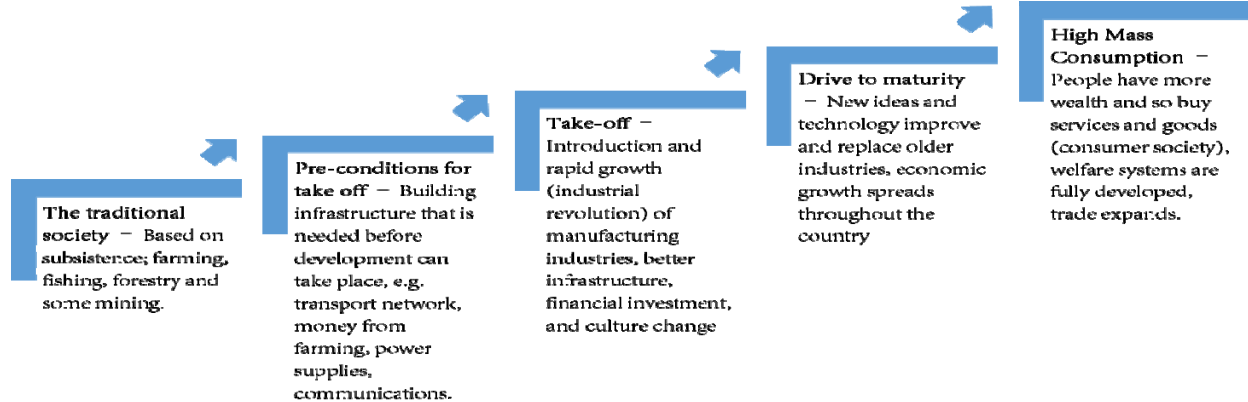
² Di Cina proses modernisasi berasal dari hancurnya sistem imperial yang paling berkelanjutan

dari kerangka kolonial, di mana sebagian di antaranya (khususnya di Asia) sebelumnya berdasarkan pada masyarakat monarki yang sentralistik dan tradisi keagamaan-kesusastraan, sementara sebagian lainnya (terutama di Afrika) berdasarkan pada struktur dan tradisi tribal.

Indonesia sebagai salah satu masyarakat Asia yang bercirikan monarki yang sentralistik (Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram) dan memiliki tradisi keagamaan-kesusastraan (Hindu, Buddha, dan Islam) memang memulai proses modernisasinya pada masa kolonialisme Belanda, terutama sejak *Veerenigde Oostindische Compagnie* (VOC)-perusahaan dagang Belanda-dibubarkan (tahun 1799) dan kekuasaannya diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pembagian Jawa menjadi 3 provinsi dan daerah lain di Nusantara menjadi 5 wilayah (*gewest*) yang kemudian diikuti dengan pembentukan *regentschappen* (keresidenan), *afdeeling* (kabupaten), dan *kewedanaan* (*district*) menunjukkan dimulainya proses modernisasi di bidang administrasi pemerintahan, yang dilanjutkan pada masa kemerdekaan Indonesia (Gernandes, 2014). Upaya pemerintahan Soekarno untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 1955 yang diikuti oleh 28 partai politik (Riyadi, 2010) juga merupakan perwujudan dari nilai dan pola demokrasi Barat. Akan tetapi, jika kita mengacu pada pendapat Soerjono Soekanto (seputarpengetahuan.com, 2014) tentang modernisasi sebagai “suatu bentuk perubahan sosial ... yang terarah (*directed change*) dan didasarkan suatu perencanaan (*social planning*)”, pada dasarnya proses modernisasi yang dialami masyarakat Indonesia menjadi amat jelas pada masa pemerintahan Orde Baru yang secara terencana mengembangkan program pembangunan lima tahun sejak tahun 1968 (PELITA I) sampai tahun 1998 (PELITA VI). Untuk hal yang terakhir ini tampak keterjalinan modernisasi dan pembangunan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rostow tahun 1960 melalui konsep pertumbuhan ekonominya (dalam Mallick, 2005). Menurut Rostow, di dalam suatu masyarakat, tahapan ekonomi dari modernisasi dapat diidentifikasi, dan tahapan itu bersifat linear dan menuju perkembangan evolusioner

dalam sejarah manusia, sebuah sistem yang berdasarkan pada tipe khusus dari institusi-institusi birokratik-terpelajar.

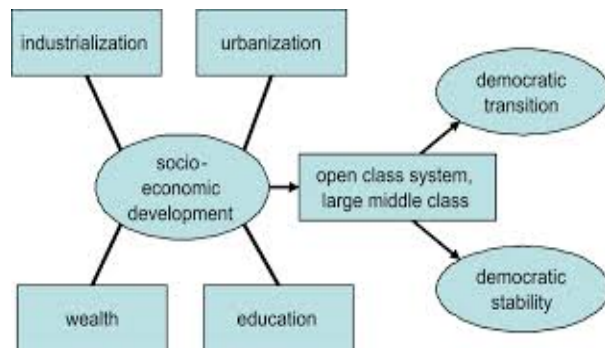
The Rostow Model



Sumber: GCSE Geography, Tanpa Tahun

yang lebih tinggi. Berikut adalah Model Modernisasi Rostow yang didasarkan pada tahapan pertumbuhan ekonomi dari masyarakat tradisional sampai pada masyarakat industri dengan konsumsi massa yang tinggi.

Tahapan linear Rostow itulah yang mendasari Program Pembangunan Lima Tahun Orde Baru selama 3 dekade implementasinya. Perkembangan yang terjadi setelah berakhirnya rezim Soeharto pada Mei 1998, yang mengkaitkan kegagalan pembangunan (krisis ekonomi 1996/7) dengan otoritarianisme Orde Baru, memperlihatkan memang adanya kaitan antara keberhasilan pembangunan (*micro-level modernization*) dengan proses demokratisasi (*macro-level democracy*) sebagaimana dikemukakan oleh Lipset tahun 1959. Menurut Lipset (dalam Wucherpfennig & Deutsch, 2009), “seluruh variasi aspek pembangunan ekonomi –industrialisasi, urbanisasi, kekayaan dan pendidikan—saling berhubungan dengan erat dalam membentuk satu faktor penting yang mempunyai korelasi politik dengan demokrasi”. Artinya faktor-faktor tersebut lah yang menjadi prasyarat bagi demokrasi. Hubungan tersebut bisa digambarkan sebagai berikut. Dalam hal ini, Lipset juga menekankan peran kelas menengah dalam masyarakat yang dimodernisasi, karena seperti yang diamatinya, pekerja di negara maju lebih dapat menoleransi nilai-nilai demokratis, akan tetapi kurang bisa menerima ideologi rezim yang bersifat memusuh. Hal ini dikarenakan mereka kuat dalam *human capital*, terutama pendidikan,



Sumber: Wucherpfennig, J. & Deutsch, F. (2009). “Modernization and Democracy: Theories and Evidence Revisited”, *Living Reviews in Democracy*, 1 (2009), Diunduh dari <http://democracy.livingreviews.org/index.php/lrd/article/viewarticle/lrd-2009-4/13> pada 29 Desember 2014.

dan terekspos pada khalayak yang lebih luas dan beragam, antara lain melalui asosiasi-asosiasi sukarela. Di samping itu juga karena kepada mereka diberikan hak-hak ekonomi dan politik. Pendapat Lipset ini diperjelas oleh pandangan Lerner yang mengidentifikasi urbanisasi, pendidikan, dan (media) komunikasi sebagai faktor-faktor inti dalam proses modernisasi dan partisipasi politik individu. Terlepas dari kegagalan Program Pembangunan Lima Tahun Orde Baru untuk mencapai tahap tinggal landas, atau tahapan *take off* pada model Rostow, kita tidak bisa tidak mengakui munculnya kelas menengah Indonesia yang terbentuk melalui proses pembangunan ekonomi. Kelas inilah yang secara langsung maupun tidak langsung memulai era Reformasi

dengan ‘memaksa’ Soeharto untuk mundur dari posisinya sebagai Presiden.

Melalui peran kelas menengah inilah, kita dapat memahami ide kesetaraan gender yang muncul melalui proses modernisasi dan partisipasi politik individu. Dengan kata lain, modernisasi dan partisipasi politik kelas menengah telah mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Proses munculnya ide kesetaraan gender ini barangkali akan lebih dipahami lagi jika kita mengacu pada teori modernisasi Inglehart (dalam Spiering, Smits, & Verloo, 2009) yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi mempengaruhi sistem nilai masyarakat yang mengarah pada demokrasi dan kesetaraan gender. Menurut dia, pada fase pertama modernisasi yang disebut industrialisasi, ada pergeseran budaya dari nilai-nilai tradisional ke nilai-nilai sekular-rasional, dikarenakan adanya spesialisasi pekerjaan, kompleksitas organisasi yang semakin besar, serta tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Modernisasi inilah yang membawa wanita ke dalam pasar tenaga kerja yang bukan agrikultural. Lebih jauh lagi, dengan lebih diartikulasikannya apa yang disebut publik, serta adanya tuntutan pekerjaan agar setiap individu berpikir untuk dirinya sendiri, sebagai akibatnya partisipasi politik juga meningkat. Hal yang terakhir ini terutama terkait dengan apa yang disebut Spierings, Smits, dan Verloo (2009) sebagai demokrasi praktikal, yaitu bagaimana partisipasi diimplementasikan dalam praktek, dan demokrasi macam ini sangat penting dalam mengubah struktur gender karena difokuskan pada partisipasi yang adil dan setara. Di Indonesia, perempuan yang sebelumnya selalu ditempatkan dalam konteks keluarga dan diikat dengan tradisi mulai masuk ke dalam dunia publik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki, sehingga kita mulai mengenal istilah peran perempuan dalam pembangunan (Sudarta, Tanpa Tahun). Dalam GBHN 1993, misalnya dikatakan bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria dalam pembangunan, bahkan Indonesia sudah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam UU no. 7 tahun 1984 (Sudarta, Tanpa Tahun).

Walaupun Inglehart dalam Spierings, dkk. juga membicarakan fase kedua yang disebutnya sebagai postmodernisasi yang mencakup pergeseran budaya dari bertahan hidup ke nilai-nilai yang

mengekspresikan diri. Akan tetapi dalam kaitannya dengan negara-negara Muslim, ia (dan Norris) berpendapat bahwa negara-negara tersebut masih berada pada fase pertama (Sudarta, Tanpa Tahun). Oleh karena itu, menurut Inglehart dan Norris, di negara-negara ini -barangkali termasuk Indonesia-, hubungan perempuan dengan pasar tenaga kerja masih menjadi aspek penting dari kesetaraan gender.

Perempuan Indonesia dan Perubahan

Salah satu program pembangunan yang diilhami teori modernisasi adalah apa yang disebut Tjondronegoro sebagai revolusi hijau (Munthe, 2002). Program pembangunan pertanian ini, dalam pandangan Tjondronegoro adalah salah satu strategi yang diterapkan pemerintah untuk menimbulkan perubahan sosial di perdesaan Jawa. Revolusi hijau adalah program intensifikasi tanaman pangan yang membawa ide-ide modernisasi dalam bentuk penerapan teknologi pada pengelolaan tanah, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, penggunaan sarana-sarana produksi, dan pengaturan waktu panen, disamping pengaturan dan pembenahan kelembagaan produksi pertanian yang terkait, seperti kelompok tani, KUD, PPI, Bank Perkreditan, P3A, dan sebagainya. Bahkan, selanjutnya revolusi hijau juga dikembangkan dalam bentuk ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi usaha pertanian (Munthe, 2002). Tulisan Witrianto Dt. Bandaro (2010) juga membahas dampak modernisasi terhadap kehidupan petani di perdesaan, akan tetapi lokasi yang ditelitinya adalah perdesaan Minangkabau. Salah satu dampak dari modernisasi yang dilihat Witrianto adalah bahwa modernisasi memisahkan kegiatan-kegiatan ekonomi dari kegiatan-kegiatan kekeluargaan dan komunitas.

Jika di satu sisi, modernisasi tersebut dianggap telah membawa perubahan menuju masyarakat yang, menurut konsep Rostow, lebih dewasa, akan tetapi di sisi lain, implementasi modernisasi pertanian melalui program revolusi hijau tersebut dianggap telah merusak tatanan masyarakat perdesaan, khususnya terkait dengan apa yang disebut Hadriana Marheini Munthe (2002) sebagai “hubungan kesetaraan gender atau keseimbangan gender” melalui “partisipasi perempuan yang secara historis dan traditional ... telah memainkan peranan penting di sektor

pertanian perdesaan”. Bahkan, hasil kajian Clifford Geertz, menurut Ester Boserup (1984), menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya aktif sebagai pekerja dalam industri rumah tangga, ketika produksi untuk keperluan rumah tangga beralih menjadi industri rumah tangga yang menghasilkan barang-barang untuk dijual, tetapi “satu perusahaan telah dimulai oleh seorang [perempuan] dan terus diselenggarakan olehnya” (hlm. 97). Dengan kata lain, perempuan adalah “majikan dan juga pekerja” dalam pengembangan industri rumah tangga yang berspesialisasi dalam hasil-hasil yang secara tradisional dihasilkan oleh perempuan (*Ibid.*). Seperti dikemukakan dalam editorial Wacana ELSPAT Edisi 30/VIII (Tanpa Tahun) dengan topik Perempuan dan Politik Pangan, “[p]artisipasi perempuan dalam usaha pertanian sebagai kegiatan ekonomi keluarga dan perdesaan tidak bisa dianggap remeh, mulai dari proses produksi pangan sampai pascapanen, serta pengelolaan konsumsi pangan keluarga”. Akan tetapi, dengan dipakainya teknik pertanian modern, perempuan tidak lagi terlibat secara penuh dalam bidang pertanian, karena ada penilaian bahwa perempuan tidak bisa menangani mesin pertanian (traktor) (Maulana, 2013). Bahkan, dengan adanya penggilingan padi/perontok gabah atau *huller*, perempuan tidak bisa lagi menumbuk padi untuk mendapatkan penghasilan tambahan bagi keluarganya. Food Agriculture Organization (FAO), memperkirakan bahwa pemakaian *huller* di Jawa telah mengakibatkan 1,2 juta perempuan yang tidak memiliki lahan kehilangan pekerjaan (Astuti & Tim G-Help, 2008). Dengan kata lain, partisipasi tradisional mereka sebagai pekerja di sawah menjadi tersingkir. Ditambah lagi dengan minimnya ketrampilan dan pendidikan yang mereka miliki membuat banyak perempuan dari perdesaan pergi ke kota menjadi buruh-buruh murah atau pekerja seks komersial. Terdamparnya mereka di kota telah menambah jumlah orang miskin perkotaan. Inilah yang dikenal dengan konsep pemiskinan perempuan (Astuti & Tim G-Help, 2008).

Tri Marhaeni P. Astuti (2000: 495-497), dalam studinya di Grobogan, Jawa Tengah menyebutkan bahwa migrasi perempuan ke kota, bahkan sampai ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), untuk menanggulangi kemiskinan ini bisa dikatakan sebagai “gerakan tandingan”, karena menurutnya,

“[p]eran dan kedudukan perempuan yang selama ini selalu digambarkan sebagai sosok ibu dan isteri yang baik, sebagai sosok yg selalu menurut kepada orang tua dan suami, mulai mendapat reaksi dari perempuan itu sendiri. Perempuan mulai berani melangkah keluar rumah demi memperoleh penghasilan dan menopang kehidupan keluarga. Keberanian perempuan ini sebenarnya merupakan salah satu bukti bahwa perempuan itu telah merekonstruksi sejarah hidupnya dan mulai menggugat ideologi familialisme (Abdullah, 1997). Mereka melupakan batas-batas kultural dan nilai-nilai yang selama ini membelenggu.....”

Pada tahap selanjutnya, sebagaimana digambarkan oleh Tri Marhaeni P. Astuti, migrasi tersebut menyebabkan beberapa perubahan dalam pola hidup perempuan, antara lain ia berubah menjadi “perempuan mandiri yang tidak lagi tergantung pada orang tua” (2000:496), mulai “mempunyai posisi tawar yang cukup kuat” terhadap suami (*Ibid.*, hlm. 507), serta mulai mendapatkan penghargaan dari masyarakat, yaitu sebagai “seorang yang sudah kaya, pintar cari uang, dan berjasa kepada keluarga” (*Ibid.*, hlm. 511). Walaupun pada akhirnya Tri Marhaeni P. Astuti menyimpulkan bahwa penghargaan kepada migran perempuan tersebut merupakan penghargaan “semu” karena peran domestik yang dijalankan suami selama kepergian istrinya langsung dikembalikan lagi ketika si istri dari luar negeri, akan tetapi penting untuk menggaris-bawahi perubahan kultural dan nilai yang terjadi pada perempuan melalui pengalamannya bekerja di luar negeri yang tidak mungkin dihapuskan.

Perubahan yang dialami perempuan Indonesia di perdesaan barangkali tidak sekompleks perubahan yang dialami oleh perempuan di perkotaan. Kebutuhan hidup yang semakin mahal di Jakarta, mendorong semakin banyak perempuan yang ‘keluar rumah’ untuk bekerja. Sebagaimana dilaporkan oleh Kurniawati Hastuti Dewi, distribusi penduduk Indonesia menurut pekerjaan menunjukkan bahwa jumlah perempuan di daerah perkotaan yang bekerja sebagai buruh atau pegawai tahun 2010, yaitu sebesar 52.98%, lebih tinggi dibanding jumlah pekerja laki-laki pada jenis pekerjaan yang sama, yaitu 50.14%. Begitu pula jika kita melihat persentase perempuan yang bekerja di antara penduduk Jakarta berumur 15

tahun ke atas pada tahun 2010, angkanya meningkat dari 37.03% tahun 2005 menjadi 44.86%. Sementara itu, persentase perempuan yang tinggal dan mengurus rumah tangga menurun yaitu dari 43.32% pada tahun 2005 menjadi 38.77%. Meningkatnya jumlah wanita yang bekerja ini menimbulkan masalah dalam hal pengasuhan anak, yang kebanyakan diserahkan pada pembantu rumah tangga (politik.lipi.go.id, Tanpa Tahun). Cara ini membawa resiko bagi proses tumbuh kembang maupun keamanan anak (dengan semakin maraknya kasus penculikan anak dan bayi). Selain itu, kita juga melihat terjadinya perubahan nilai yang cukup besar pada perempuan perkotaan.

Fenomena perkotaan yang ditandai dengan semakin banyak perempuan yang bekerja ini sepertinya mendorong Universal Networks International untuk melakukan studi. Hasil studi psikografi Universal Networks International yang bekerja sama dengan Synovate menghasilkan potret perempuan urban modern yang unik yang disebut *High Heeled Warriors* (Fazriyati, 2011). Perempuan urban modern Indonesia dikatakan memiliki 10 sifat unik sebagai berikut: (1) Percaya bahwa memiliki karier adalah cara untuk berkontribusi kepada keluarga, dan prioritasnya dalam memberi produk juga untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya; (2) Sahabat adalah bagian terpenting dalam hidupnya; (3) Terpelajar dan selalu mencari informasi terbaru agar bisa merencanakan kehidupan dengan lebih baik; (4) Berorientasi sukses dalam setiap aspek kehidupan, termasuk sukses dalam membina keluarga harmonis dan membesarkan anak-anak; (5) Berorientasi karier dan kepuasan pribadi, memiliki rasa penghormatan atas diri sendiri serta kebanggaan dengan menjadi perempuan dan ibu bekerja yang sukses dan modern; (6) Ingin terlihat cerdas dan modern (intelektual dan melek *fashion*) dalam berpenampilan dan membawakan diri; (7) Melek keuangan (tidak melihat dirinya sebagai sosok pasif dalam pengambilan keputusan, terutama di keluarga), secara berkala mendiskusikan keluarga dengan suami, dan merencanakan keuangan dengan lebih baik untuk hidup lebih mapan; (8) Melek teknologi. Agar selalu terhubung dengan keluarga dan teman, mereka termotivasi untuk memiliki teknologi terkini, (9) Perduli pada kesehatan. Fitness dan aerobik menjadi pilihan

untuk membantunya mencegah penyakit dan meningkatkan nutrisi sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidupnya, dan (10) Ingin aman dan nyaman dengan menghargai relaksasi dan memanjakan diri. Namun, kenyamanan ini tidak hanya untuk dirinya pribadi melainkan dengan merencanakan masa depan keluarga atau kehidupan aman dan nyaman untuk keluarganya. Hasil survei di atas menunjukkan bahwa dilema perempuan kota untuk menyelesaikan apa yang disebut Daniel Dhakidae (1994, 36-44) sebagai “*nemesis* ruang publik” (bahwa keberhasilan perempuan untuk masuk ke ruang publik menjadi *nemesis* perempuan itu sendiri), tidak pernah berkurang, sehingga perempuan cenderung tidak berubah statusnya, yaitu masih berada dalam status domestik. Menurut Dhakidae, terbukanya ruang publik malah semakin meningkatkan ketergantungannya (perempuan) kepada dunia laki-laki, karena “perempuan adalah ‘ratu’ dalam rumah tangga, tetapi tetap menjadi ‘pendamping dan pendukung suami’ dalam ruang publik”. Pendapat Daniel Dhakidae ini sejalan dengan kesimpulan Tri Marhaeni P. Astuti tentang perempuan di perdesaan, bahwa dimana pun mereka berada, “perempuan tetap memikul beban-beban domestik”.

Gambaran tentang perempuan Indonesia di perdesaan dan perkotaan serta perubahan yang dialaminya di atas memperlihatkan bahwa ide modernisasi yang terkandung dalam program pembangunan pada hakekatnya telah terserap dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga kita bahkan bisa mengidentifikasi *consumer society*, yang disebutkan Rostow pada tahap akhir model modernisasi atau pertumbuhan ekonominya, terutama dari ciri-ciri wanita urban yang dipaparkan Universal Networks International di atas.

Seperti ditekankan oleh Andy Sumner dan Sergio Tezanos Vázquez, tidak ada tingkat perkembangan masyarakat yang bersifat linear seperti klasifikasi pendapatan per kapita atau HDI (*Human Development Index*), yaitu dari yang tingkat perkembangannya rendah ke tingkat perkembangan tinggi (Sumner & Vázquez, 2013). Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan klasifikasi yang dibuat Sumner dan Vázquez terhadap negara-negara yang termasuk *a non-linear (developing) world*. Dengan memperhatikan empat hal, yaitu: transformasi struktural, perkembangan

sumber daya manusia, partisipasi demokratis, dan pemerintahan yang lebih baik, serta keberlanjutan lingkungan, mereka mengklasifikasikan negara-negara berkembang ke dalam 5 kelompok sebagai berikut: (1) Negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan ekonomi yang umumnya “tradisional”; (2) Negara-negara dengan tingkat malnutrisi dan kemiskinan yang tinggi dan merupakan pengekspor produk primer, serta mempunyai kebebasan politik yang terbatas; (3) Negara-negara yang tergantung pada arus dari luar dan mempunyai tingkat ketidak-setaraan yang tinggi; (4) Ekonomi yang sedang bertumbuh melalui ekspor produk primer dengan ketidak-setaraan yang rendah, akan tetapi dengan polusi lingkungan yang tinggi dan kebebasan politik yang terbatas; (5) Ekonomi yang sedang bertumbuh secara tidak setara dengan ketergantungan yang rendah pada keuangan dari luar. Oleh kedua peneliti ini, Indonesia dimasukkan ke kluster ke 3. Artinya, perbedaan antara perempuan di perdesaan dan perempuan di perkotaan bisa dikategorikan sebagai ketidaksetaraan yang tinggi. Barangkali itu sebabnya kita melihat adanya kelompok perempuan (perdesaan) yang sepertinya masih berada di level pertama model pertumbuhan ekonomi Rostow, sedangkan ada kelompok lain (perkotaan) yang sudah berada pada level akhir.

Perempuan dan Modernisasi: Masalah dan Tantangan

Kesetaraan gender menekankan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan dan hasil yang sama. Namun, fakta menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan, melainkan di antara perempuan sendiri. Seperti telah dikemukakan di atas, antara perempuan desa dan perempuan kota ada perbedaan yang sangat besar. Subha Shree Das mengusulkan *women empowerment* untuk apa yang disebutnya sebagai “*unlocks door for modernization*” (Das, 2014). Akan tetapi, walaupun ia mengemukakan bahwa “[a]ddressing women’s issues also requires recognising that women are a diverse group, in the roles they play as well as in characteristics such as age, social status, urban or rural orientation and educational attainment [dalam mengangkat isu perempuan juga memerlukan pengakuan bahwa perempuan adalah kelompok yang beragam, dalam

peran yang mereka mainkan ataupun dalam karakteristik dasar mereka seperti usia, status sosial, orientasi urban atau rural dan pencapaian pendidikannya]”, ia lebih menekankan pada kelebihan yang diterima laki-laki dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, ia menganjurkan *women empowerment* dipromosikan melalui “*democratic governance, decentralisation and civil society participation and by developing women’s capacities through training, knowledge-sharing and networking* [pemerintahan yang demokratis, desentralisasi dan partisipasi masyarakat sipil, serta dengan mengembangkan kapasitas perempuan melalui pelatihan, berbagi pengetahuan dan pembentukan jaringan]”. Padahal permasalahannya ada pada apa yang secara sekilas juga dikemukakannya, yaitu: “[a]lthough women may have many interests in common, **the fabric of their lives and the choices available to them may vary widely** [meskipun perempuan mungkin mempunyai banyak kepentingan yang sama, akan tetapi **nuansa kehidupan dan pilihan yang tersedia untuk mereka dapat sangat bervariasi**]” (cetakan tebal ditambahkan penulis).

Perbedaan nuansa kehidupan dan pilihan yang tersedia ini memang dianjurkan agar diatasi melalui diversifikasi pendidikan dan latihan bagi perempuan. Akan tetapi, sejauh ini jarang kita temui data yang memperlihatkan variasi yang jelas di antara perempuan, sehingga sulit untuk membuat diversifikasi yang dimaksud. Data wanita yang tersedia di Indonesia, misalnya, rasio laki-laki dan perempuan yang berkisar antara 1000:986, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi. AKI di Indonesia saat ini tertinggi di Asia Tenggara yaitu 228/100.000 kelahiran (versi pemerintah), 450/100.000 kelahiran (versi WHO). Sekitar 4,2 juta perempuan Indonesia atau sekitar 70% dari total 6 juta tenaga kerja Indonesia (TKI) bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita). Di Jakarta, terdapat sekitar 80.000 orang buruh. Sebanyak 90% dari angka tersebut merupakan buruh wanita dan 75% buruh wanita yang ada di Jakarta telah mengalami kekerasan seksual (Nurhidayah, 2013). Sekitar 6,5 juta perempuan buta aksara (republika.co.id, 2010). Data Susenas tahun 2007 menunjukkan peningkatan jumlah rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan menjadi 13,60% dari 6 juta rumah tangga atau 30 juta penduduk, dibanding dengan

data PEKKA (Perempuan Kepala Rumah Tangga) tahun 2001 yang kurang dari 13% (pekka.or.id); data yang terkini (2012) menunjukkan adanya 7 juta perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga, atau lebih dari 14% dari total rumah tangga di Indonesia (<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/jutaan-perempuan-kepala-keluarga-indonesia-hidup-miskin/945252>). Di sisi lain, Data BPS 2009 menunjukkan bahwa sebanyak 75,69% perempuan usia 15 tahun ke atas hanya berpendidikan tamat SMP ke bawah, di mana mayoritas perempuan hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SD, yakni sebanyak 30,70%. Semakin tinggi tingkat pendidikan, persentase partisipasi pendidikan perempuan semakin rendah, yaitu SMA (18,59%), Diploma (2,74%), dan Universitas (3,02%) (<http://sosbud.kompasiana.com/2013/05/10/data-perempuan-indonesia-neri-neri-sedap-ternyata-558795.html>). Di luar data-data di atas, termasuk data pendidikan, sulit kita menemukan data yang memperlihatkan perbedaan status sosial antara wanita, terlebih jika kita ingin menggabungkannya dengan orientasi urban-ruralnya. Tanpa data-data yang lebih terperinci, akan sulit untuk membuat sebuah program pemberdayaan perempuan yang tepat sasaran.

Menarik sekali untuk menggarisbawahi apa yang dikemukakan Suryadi sebagai “Tantangan Perempuan Indonesia” (Suryadi, Tanpa Tahun).³ Ia menempatkan perempuan sebagai seseorang yang harus “memainkan peran ganda sekaligus, yaitu karir dan rumah tangga”, akan tetapi ia menekankan bahwa “keluarga dan anak harus tetap menjadi prioritas perempuan, di samping karir”. Ia menganjurkan “manajemen waktu, kualitas komunikasi, kasih sayang dan cinta yang optimal kepada anak dan suami menjadi pelajaran wajib bagi perempuan mendatang”. Akan tetapi, ia juga mengemukakan bahwa “keluarga demokratis yang dilandasi spirit religiusitas, merupakan prasyarat dukungan bagi perempuan untuk maju”. Bahkan, ia menganggap “dukungan kaum pria merupakan

³Suryadi. (Tanpa Tahun). “Tantangan Perempuan Indonesia”. diambil dari <http://www.indomedia.com/BPost/032007/10/opini/opini1.htm> oleh Dunia Esai, http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176:tantangan-perempuan-indonesia&catid=39:gender&Itemid=93, diakses tanggal 4 Januari 2015.

wujud kemitrasejajaran dalam membangun keluarga berkualitas”. Tampak di sini mulai ada pergeseran nilai dalam hubungan antargender di Indonesia. Akan tetapi, sejauh mana hal tersebut membantu permasalahan yang dihadapi perempuan, khususnya perempuan desa dan miskin? Kita perlu mendiskusikan lebih lanjut apa yang diusulkan Suryadi bahwa “sekarang saatnya setiap elemen bangsa turut mendukung peningkatan kualitas perempuan Indonesia”. Menurutnya, karena “keluarga berkualitas merupakan pilar kemajuan masyarakat dan bangsa”, dan “dalam nilai masyarakat, perempuan masih menjadi penanggung jawab kualitas anak dan keluarga”, maka diperlukan “perhatian dan keseriusan pemerintah dalam peningkatan kualitas perempuan Indonesia”. Untuk mewujudkan saran Suryadi ini, penting diadakan pengkajian ulang kebijakan negara terhadap perempuan. Benarkah kebijakan negara hanya perlu difokuskan pada peningkatan peran perempuan dalam pembangunan? Ataukah negara perlu mengkaji ulang peran perempuan dalam keluarga sebagai pilar kemajuan masyarakat dan bangsa? Dua hal itu tampak sama, tetapi mempunyai kerangka kerja yang berbeda.

Kesimpulan

Perubahan yang dibawa oleh modernisasi melalui proses industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi berdampak pada perubahan peran perempuan dalam keluarga dan di ruang publik. Jumlah perempuan yang bekerja di luar rumah semakin meningkat. Walaupun meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja memang diharapkan dalam program pembangunan yang disponsori negara, pada dasarnya prinsip kesetaraan gender yang diperkenalkan oleh proses modernisasi tidak berjalan sebagaimana semestinya, karena negara tetap mempertahankan konsep perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dengan kata lain, negara menerapkan kebijakan peran ganda kepada perempuan. Dalam hal ini perlu ada perubahan sikap negara, khususnya melalui perubahan sistem hukum yang mencerminkan pola relasi yang setara dan adil di antara laki-laki dan perempuan, terutama ketika perempuan sebagai ibu rumah tangga juga memberi kontribusi ekonomi dengan bekerja di luar rumah. Seperti dikatakan oleh Ratna Batara Munti (2000: 242), “tidaklah tepat jika suami kemudian menuntut cerai karena alasan ia

[istri] berkarier”. Masalah ketimpangan hukum ini semakin serius, ketika kasusnya menyangkut perempuan yang menjadi kepala rumah tangga, padahal menurut data Susenas 2012, rumah tangga yang dikepalai perempuan cukup banyak, yaitu 14,42% (kemenpppa.go.id, 2014).

Legalisasi terhadap budaya patriarki yang dilakukan negara tidak hanya menimbulkan persoalan tentang tiadanya penghargaan terhadap hak-hak ekonomi perempuan, khususnya para ibu rumah tangga, melainkan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap konsep anak perempuan mengenai dirinya, peran, serta gambaran tentang dirinya di masa depan. Sebagaimana dikemukakan oleh Th. J. Erlyina (2000) --melalui refleksinya atas proses pendampingan yang telah dilakukan JMJ (Jentera Muda Jakarta) bagi anak-anak perempuan pekerja domestik di wilayah Kampung Jembatan-- perlakuan yang berbeda yang diterima anak perempuan dalam melakukan tugas rumah tangga di mana mereka harus melakukan pekerjaan rumah tangga yang lebih banyak jumlahnya dan jenisnya berbeda dengan tugas anak laki-laki, di satu sisi “[mengawetkan] citra diri perempuan sesuai pola patriarkal yang ada di masyarakat dalam diri anak-anak perempuan” (hlm.532),tetapi di sisi lain juga memunculkan sikap perlawanan atau “tindak pemberontak yang tidak disadari,” karena anak-anak perempuan tersebut “tidak memahami mengapa, setelah [mereka] menunjukkan kepatuhan kepada orang tua, [mereka] tetap tidak boleh melakukan kegiatan yang disukai”, atau “kehendak mandiri mereka” (hlm. 543). Ada yang melakukan *slow-down strike* atau tindak menarik diri dari dunianya yang bertujuan untuk *self-destruction* (*Ibid.*, hlm. 535), ada yang menjadi sulit diatur dan sering berbohong, ada pula yang karena menyesuaikan diri dengan tuntutan orang tua, ia menekan pikiran, perasaan, dan keinginan dirinya sehingga “menciptakan kecemasan pada anak [tersebut], ketidakberanian untuk mengambil inisiatif, dan keraguan dalam bertindak” (*Ibid.*, hlm. 536). Mungkin ia juga akan “mengadakan perlawanan tersembunyi dengan bertindak melawan segala aturan di luar rumahnya” (*Ibid.*). Oleh karena itu, usulannya adalah memberi “penghargaan yang setara terhadap kerja domestik seperti yang diberikan masyarakat kepada sektor publik”, di samping memberikan kesempatan yang

sama kepada anak perempuan seperti kepada anak laki-laki untuk mengakses sektor lain, seperti pendidikan, politik, maupun sosial budaya, yaitu agar [anak-anak] perempuan memiliki “suatu kehidupan yang lebih sehat dan bahagia”. Ketidakpedulian kita pada permasalahan ini akan merugikan perjalanan masyarakat kita, masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- “6,5 Juta Perempuan Indonesia Buta Aksara”. (2010). *Republika Online* (26 Februari). Diunduh dari <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/104984> pada 4 Januari 2015.
- “10 pengertian modernisasi menurut para ahli”. Diunduh dari <http://www.seputarpengetahuan.com/2014/10/10-pengertian-modernisasi-menurut-para.html> pada 28 Desember 2014.
- Astuti, T.M. (2000). “Gerakan Tandingan Perempuan: Kasus Migrasi Perempuan Kelas Bawah di Grobogan, Jawa Tengah”. dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (Ed.). *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (hlm. 493-515). Jakarta: Program Studi Kajian Wanita – Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Astuti, N.H. & Tim G-Help. (2008). “Revolusi Hijau: Pemiskinan Perempuan”, dalam *Gender, Health, and Environmental Linkages Program (G-help), Seri Lembar Fakta G-help, Edisi XIV, September 2008*, 35-36. Diunduh dari <http://chr.ui.ac.id/wp-content/uploads/downloads/2013/06/buku-lembar-fakta-kompilasi-final.pdf> pada 30 Desember 2014.
- Barret, T. (1997). “Modernism and Postmodernism: An Overview with Art Examples”. Dalam J. Hutchens & M. Suggs (Eds.). *Art Education: Content and Practice in a Postmodern Era*. Washington DC: NAEA. Diunduh dari http://www.terrybarrettosu.com/pdfs/B_PoMo_97.pdf pada 30 Desember 2014.
- Bernstein, H. (1971). “Modernization theory and the sociological study of development”, *Journal of Development Studies*, 7 (2), 141-160, Diunduh dari <http://www.artsrn.ualberta.ca/courses/PoliticalScience/670A1/documents/HenryBernstein-ModernizationSociologyofDev.pdf> pada 28 Desember 2014.

- Boserup, E. (1984). *Peranan Wanita Dalam Perkembangan Ekonomi*. Pengantar Pudjiwati Sajogyo, Penerjemah Mien Joebhaar dan Sunarto, Penyunting A.A. Harahap, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- “Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Petani di Perdesaan Minangkabau”. (2010). Diunduh dari <http://witrianto.blogdetik.com/2010/12/08/dampak-modernisasi-terhadap-masyarakat-perdesaan/comment-page-1/> pada 30 Desember 2014.
- Das, S.S. (2014). “Women Empowerment Unlocks Door for Modernization”. *The Pioneer*. Diunduh dari http://www.in.undp.org/content/dam/india/docs/In-the-News-2014/UNDP_India_in_the_news_1003201402.pdf pada 4 Januari 2015.
- Dhakidae, D. (1994). “Perempuan dan Profesi Jurnalistik dalam Perkembangan Kelas Tengah”, dalam D. Dhakidae (editor). *Perempuan, Politik dan Jurnalisme: Tujuh puluh Tahun Toety Azis* (hlm. 15-48). Jakarta: Yayasan Padi Kapas.
- Eisenstadt, S.N. (1996). The Basic Characteristics of Modernization (1966) [1], Themenportal Europäische Geschichte_Clio online. Diunduh dari http://www.europa.clio-online.de/site/lang_en/ItemID__72/mid__11373/40208215/default.aspx pada 28 Desember 2014.
- ELSPPAT. (Tanpa Tahun). “Perempuan dan Politik Pangan”, *Wacana ELSPPAT Edisi 30/ VIII* Diunduh dari <http://www.elsppat.or.id/download/file/e30.pdf> pada 30 Desember 2014.
- Erlyina, Th. J. (2000). “Anak Perempuan Pekerja Domestik: Perjuangan Mencari Kebebasan dalam Lingkup Budaya Patriarkal”, dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (penyunting). *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (hlm. 517-538). Jakarta: Program Studi Kajian Wanita – Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Fazriyati, W. (2011). “10 Keunikan Perempuan Indonesia”. *Harian Kompas/Kompas TV: FEMALE*. Diunduh dari <http://female.kompas.com/read/2011/10/30/12575615/10.Keunikan.Perempuan.Indonesia>, pada 30 Desember 2014.
- GCSE Geography. (Tanpa Tahun). “Development Dilemmas”. Diunduh dari <http://www.gcsegeography.co.uk/people-and-the-planet/development-dilemmas> pada 30 Desember 2014.
- Gernandes, H. (2014). “Sistem Pemerintahan Indonesia pada Masa Penjajahan Kolonial Hindia Belanda”. Diunduh dari <http://heru2273.blogspot.com/2014/04/sistem-pemerintahan-indonesia-pada-masa.html> pada 31 Desember 2014.
- Harrison, P. (2001). “Models of Modernity: capitalism, democracy and the nation-state”. TASA 2001 Conference. The University of Sydney. 13-15 December 2001, Diunduh dari http://www.tasa.org.au/docs/conferences/2001_01/301101%20Harrison.pdf pada 30 Desember 2014.
- “Jutaan perempuan kepala keluarga Indonesia, hidup miskin”. (2012). *ABC Radio Australia* (17 Mei). Diunduh dari <http://www.radioaustralia.net.au/indonesia/n/radio/onairhighlights/jutaan-perempuan-kepala-keluarga-indonesia-hidup-miskin/945252> pada 4 Januari 2015.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2014). “Karakteristik Rumah Tangga”. Diunduh dari <http://www.kemennppa.go.id/v3/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/629-karakteristik-rumah-tangga> pada 25 Januari 2015.
- Mallick, O.B. (2005) “Development Theory: Rostow’s five stage model of development and its relevance in globalization”. Essay, School of Social Science, Faculty of Education and Arts, University of Newcastle. Diunduh dari <http://202.202.111.134/jpk/data/gjzrzygl/web%20prepare20110608/paper/Rostow%20Development%20Model%201960.pdf> pada 30 Desember 2014.
- Marlita, T. & Poerwandari, E.K. (2000). “Pergerakan Perempuan Indonesia: 1928-1965” dalam E.K. Poerwandari & R.S. Hidayat (Ed.). *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (hlm. 81-112). Jakarta: Program Studi

- Kajian Wanita – Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Maulana, I. (2013). “Dampak Revolusi Hijau Pada Masa Orde Baru Terhadap Perempuan”. Diunduh dari <http://ianmaulana13037.blog.teknikindustri.ft.mercubuana.ac.id/?p=27> pada 30 Desember 2014.
- Munthe, H.M. (2002). “Pengaruh Modernisasi Pertanian Terhadap Partisipasi Perempuan di Perdesaan: Suatu Tinjauan Sosiologi”. USU Digital Library. Diunduh dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3840/1/sosiologi-hadriana.pdf> pada 30 Desember 2014.
- Munti, R.B. (2000). “Aturan Hukum Tentang Perkawinan dan Implikasinya pada Perempuan” dalam E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat (penyunting). *Perempuan Indonesia Dalam Masyarakat yang Tengah Berubah* (hlm. 233-263). Jakarta: Program Studi Kajian Wanita – Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Nurhidayah, S. (2013). “Data Perempuan Indonesia, Ngeri-neri Sedap Ternyata...”. Diunduh dari <http://sosbud.kompasiana.com/2013/05/10/data-perempuan-indonesia-neri-neri-sedap-ternyata-558795.html>, diakses tanggal 4 Januari 2015.
- PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). Diunduh dari <http://pekka.or.id/8/> pada 4 Januari 2015.
- “Pembangunan Nasional pada Masa Orde Baru”, -s~E~zo-Center. Diunduh dari <http://sembilanezappo.wordpress.com/pembangunan-nasional-pada-masa-orde-baru/> pada 28 Desember 2014.
- Protevi, John. (Tanpa Tahun). “Notes on Plato’s Republic”. Diunduh dari http://www.protevi.com/john/FH/Republic_complete.pdf pada 27 Desember 2014.
- Riyadi. (2010). “Belajar dari Sejarah: Pemilu Tahun 1955”. Diunduh dari <http://pencerahan-sejarah.blogspot.com/2010/11/pemilu.html> pada 28 Desember 2014.
- “Sistem Penduduk Perempuan Pekerja”, Diunduh dari <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/jender-and-politik/794-sistem-pendukung-perempuan-pekerja.html> pada 30 Desember 2014.
- Spierings, N., Smits, J., & Verloo, M. (2009). “On the Compatibility of Islam and Gender Equality: Effects of Modernization, State Islamization and Democracy on Women’s Labor Market Participation in 45 Muslim Countries”. *Soc Indic Res*, 90, 503-522, DOI:10.1007/s11205-008-9274-z, Diunduh dari <http://www.ru.nl/publish/pages/529479/2009-onthecompatibilityofislamandgender-equality-spieringssmitsverloo.pdf> pada 30 Desember 2014.
- Sudarta, W. (Tanpa Tahun). “Peranan Wanita dalam Pembangunan Berwawasan Gender”. Diunduh dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/srikandi/article/download/2758/1951> pada 30 Desember 2014.
- Sumner, A. & Vázquez, S.T. (2013). “A development classification in a non-linear (developing) world”. Diunduh dari <http://www.makingitmagazine.net/?p=7791> pada 31 Desember 2014.
- “Soempah Pemoeda”. Diunduh dari <http://sumpahpemuda.org/> pada 27 Desember 2014.
- Suryadi. (Tanpa Tahun). “Tantangan Perempuan Indonesia”. Diunduh dari <http://www.indonesia.com/BPost/032007/10/opini/opini1.htm> oleh Dunia Esai, http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=176:tantangan-perempuan-indonesia&catid=39:gender&Itemid=93 pada 4 Januari 2015.
- “The Republic by Plato (360 BC)”, translated by Benjamin Jowett, An Electronic Classics Series Publication, 1998-2013, Diunduh dari <http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/plato/republic.pdf> pada 27 Desember 2014.
- “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Diunduh dari http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/keudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf pada 27 Desember 2014.
- Wucherpfennig, J. & Deutsch, F. (2009). “Modernization and Democracy: Theories and Evidence Revisited”. *Living Reviews in Democracy*, 1. Diunduh dari <http://democracy.livingreviews.org/index.php/lrd/article/viewarticle/lrd-2009-4/13> pada 29 Desember 2014.